

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pandemi adalah suatu kondisi penyebaran jenis penyakit tertentu yang terjadi lebih dari satu negara. Wabah ini telah menyebar hampir seluruh bagian wilayah di dunia. Kondisi pandemi saat ini telah menggambarkan suatu keadaan penyebaran penyakit yang di luar kendali. Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah melebihi kapasitas epidemic sehingga hal tersebut menjadikan status penyebaran Covid-19 telah menjadi wabah pandemi (Almi, 2020).

Badan kesehatan dunia *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 12 Maret 2020 telah menetapkan bahwa fenomena penyebaran Covid-19 ini menjadi pandemi. Penyebaran Covid-19 sangat cepat hingga pada 7 Mei 2020 WHO memaparkan tentang data penyebaran Covid-19 secara global. Di Indonesia virus Covid masuk pada tanggal 27 maret 2020 yang kasusnya di temukan di Jakarta dan dibawa oleh masyarakat tiongkok. Sedangkan di Gorontalo virus covid pertama kali menghebohkan masyarakat yakni pada bulan April tahun 2020 yang kasusnya ditemukan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dibawa oleh salah satu jamaah yang berasal dari Makassar dan melalui Palu sehingga sampai ke Gorontalo.

Pandemi Covid-19 yang masih bergulir hingga saat ini telah memberikan dampak besar di berbagai sektor, tidak hanya sektor kesehatan namun sektor lain seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan juga menerima dampak serius akibat pandemi ini. Dari segi ekonomi, banyak negara di dunia mengalami siklus

resesi yang ditandai dengan penurunan secara signifikan pertumbuhan ekonomi secara berturut-turut. Kondisi tersebut terjadi lantaran penyokong produk domestik bruto (PDB) anjlok, seperti industri terkontraksi dalam periode panjang, peningkatan pengangguran, penurunan penghasilan, serta penurunan penjualan grosir dan ritel. Berdasarkan hasil analisis dari jurnal 'Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19', ditunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,97% pada masa pandemi covid 19 sehingga membutuhkan penanganan secara signifikan (National Geographic, 2020).

Upaya pemerintah Indonesia untuk memperkecil dampak pandemic terhadap ekonomi masyarakat yakni dengan memberikan jaring pengaman sosial terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak selama pandemi. Itu dilakukan dengan tujuan agar masyarakat masih tetap bisa memenuhi kebutuhan konsumsi barang dan jasa. Adapun beberapa jaring pengaman sosial yang sudah dilakukan adalah peningkatan dan perluasan PKH, peningkatan dan perluasan kartu sembako, penambahan dan fleksibilitas kartu prakerja, hingga Bantuan Langsung Tunai dari dana desa bagi masyarakat desa yang dikenal dengan BLT-DD (Permendesa PDTT 13/2020).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang disalurkan sejak tahun 2020 dan sampai saat ini memang sudah dinikmati oleh masyarakat. Berikut ini dapat dilihat penyerapan dana BLT DD di Provinsi Gorontalo.

**Tabel 1. 1** BLT DD Bulan Januari Sampai Mei 2021 Tahun 2021

BULAN	BLT-DD (Dalam Rupiah)	KPM (Juta Jiwa)
Januari	1.280.000.000.000	4,27
Februari	850.000.000.000	2,8
Maret	507.000.000.000	1,6
April	294.000.000.000	0.98
Mei	159.000.000.000	0.53

Sumber Data : Pemerintah Desa Tamboo

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa BLT-DD tertinggi yakni pada bulan Januari 2021 sudah tersalurkan 1,28 triliun dengan penerima manfaat lebih dari 4,27 juta keluarga dan yang terendah adalah pada bulan Mei 2021 sudah dicairkan 159 miliar kepada 531 ribu penerima manfaat. Sasaran penerima BLT DD ini merupakan masyarakat desa yang masih membutuhkan bantuan ekonomi seperti masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat COVID-19, masyarakat yang belum terdata pada kelompok penerima bantuan sosial lainnya, dan masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan sakit kronis.

Hal ini juga sejalan dengan peraturan pemerintah untuk memberikan keluasaan atas pengalihan dana desa untuk Covid-19 seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK No.205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDDT No. 11 Tahun 2019 yang dimaksudkan untuk mengatur tentang prioritas

penggunaan dana desa Tahun 2020 untuk: (1) Pencegahan dan penanganan Covid-19; (2) Padat Karya Tunai Desa ; (3) Bantuan Langsung Tunai Desa. Hal ini tentu berbeda dengan Permendes PDPTT No. 11 Tahun 2019 yang mana dalam peraturan tersebut tidak dijabarkan atau dijelaskan penggunaan dana desa ini ditujukan untuk penanganan pandemic Covid-19.

Penyaluran BLT-DD di Gorontalo juga telah dilaksanakan sesuai peraturan pemerintah. Pada tahun 2021 progres penyaluran BLT-DD yang telah masuk di rekening yaitu Rp. 460.383.269.227 dari total dana desa Rp. 693.158.141.000 atau mencapai 72.03%. Untuk lebih jelasnya penyaluran BLT DD se Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. 2 Progres Penyaluran BLT-DD Tahun 2021 di Gorontalo**

No	Kabupaten	Progres BLT-DD
1.	Bone Bolango	82,50%
2.	Pohuwato	78,15%
3.	Gorontalo Utara	76,42%
4.	Boalemo	71,64%
5.	Gorontalo	60,42%

Sumber Data : Pemerintah Desa Tamboo

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa progres penyaluran BLT-DD di Provinsi Gorontalo tertinggi adalah Kabupaten Bone Bolango yang mencapai 82,50% dan terendah adalah di Kabupaten Gorontalo mencapai 60,42%. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa progress tercepat penyaluran BLT-

DD di Provinsi Gorontalo adalah di Kabupaten Bone Bolango (Koordinator Pendamping Desa Gorontalo, 2021).

Salah satu desa di Kabupaten Bone Bolango yang memiliki progress baik dalam Penyaluran BLT-DD adalah Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila. Berdasarkan data yang diperoleh dari kaur kesra yakni penyaluran BLT-DD adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. 3 Penyaluran BLT DD Tahun 2020 sampai dengan 2021**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>BLT-DD</b>
2020	856.096.000,-	259.500.000,-
2021	884.367.000,-	265.310.000,-

Penetapan penerima BLT-DD ini telah dilakukan verifikasi berdasarkan peraturan pemerintah yakni dengan tiga kategori yakni masyarakat yang belum terdata pada kelompok penerima bantuan sosial lainnya seperti PKH, Sembako dan sejenisnya dan masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan sakit kronis serta mengalami dampak langsung covid 19 seperti PHK.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti yakni diketahui bahwa memang pada awalnya penetapan penerima BLT-DD di Desa Tamboo tahun 2020 masih terdapat beberapa penerima dana ganda atau duplikasi sehingga hal ini terus dilakukan verifikasi kembali dan diberikan edukasi kepada masyarakat. Kondisi ini sempat mendapatkan protes dari masyarakat dengan alasan bahwa semua masyarakat kena dampak pandemi covid-19 tapi yang mendapatkan BLT-DD hanya beberapa orang saja. Selain itu yang menjadi keluhan masyarakat yakni

kriteria penerima BLT DD, proses pendataannya apakah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah ada atukah didata ulang, bagaimana dengan beberapa Kepala Keluarga (KK) yang tinggal dalam satu rumah tetapi belum memiliki KK sendiri. Hal ini terus dilakukan edukasi sehingga pada tahun 2021 ditetapkan 66 orang penerima BLT-DD (Wawancara, Perangkat Desa Tamboo 2021)

Penggunaan anggaran Dana Desa terkait BLT-DD perlu dilakukan analisa karena dampak Pandemi terhadap ekonomi di masing-masing wilayah berbeda-beda dan Pemerintah juga tetap melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Pra Kerja, Bantuan sembako, Bansos tunai, dan Subsidi listrik, hal ini bisa memicu terjadinya penyimpangan anggaran di pedesaan, baik dana yang berasal dari Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun yang datang dari APBN seperti dana desa, diantaranya yaitu adanya data tidak diperbaharui dan tidak tervalidasi antara pusat, daerah, dan desa, besaran bantuan tidak sesuai dengan PerUndang-Undangan atau sesuai PMK No. 40/PMK.07/2020 Perubahan Atas Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 yang dimaksudkan untuk mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 untuk: (1) Pencegahan dan penanganan Covid-19; (2) Padat Karya Tunai Desa ; (3) Bantuan Langsung Tunai Desa. Hal ini tentu berbeda dengan Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 yang mana dalam peraturan tersebut tidak dijabarkan atau dijelaskan penggunaan dana desa ini ditujukan untuk penanganan pandemic Covid-19. Selain itu pada tahun 2021 walaupun telah diatur dalam peraturan pemerintah untuk prioritas penggunaan dana desa namun disisi lain ada beberapa program yang sudah termuat dalam RPJM Desa Kepala Desa tidak dapat

dilaksanakan seperti pada program pembangunan yang telah disetujui dalam musyawarah desa namun harus di pending karena anggaran difokuskan pada penanggulangan covid-19 dan stunting.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penggunaan Anggaran Dana Desa dalam Menanggulangi Masalah Covid 19 melalui Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango”.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian yakni:

1. Bagaimana penggunaan anggaran Dana Desa sebelum dan sesudah pandemic Covid 19 di Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango?
2. Bagaimana sistematika penyaluran anggaran Dana Desa BLT-DD ke Keluarga Penerima Manfaat di Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango?
3. Bagaimana pemanfaatan BLT-DD oleh Keluarga Penerima Manfaat di Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat ditetapkan tujuan penelitian berikut.

1. Mengetahui penggunaan anggaran Dana Desa sebelum dan sesudah pandemic Covid 19 di Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.
2. Mengetahui sistematika penyaluran anggaran Dana Desa BLT-DD ke Keluarga Penerima Manfaat di Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.
3. Mengetahui pemanfaatan BLT-DD oleh Keluarga Penerima Manfaat di Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini maka bisa menambah referensi ilmiah terkait penggunaan dana desa dalam penanggulangan pandemi covid 19 melalui program Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Pemerintah Desa

Bisa mendapatkan informasi terkait pemanfaatan dana desa khususnya penanggulangan bencana Covid-19 melalui program BLT-DD.

##### b. Bagi masyarakat

Bisa mendapatkan informasi tentang syarat penerima BLT-



c. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan tentang penyusunan karya ilmiah khususnya tentang penggunaan dana desa untuk penanggulangan covid 19 melalui program BLT-DD